

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KAWASAN PESISIR  
KELURAHAN PONTAP KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO**



**SKRIPSI**

*Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu  
Administrasi Negara*

Disusun Oleh:

**AFWAH**

4515021017

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
BOSOWA MAKASSAR  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

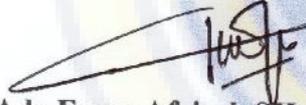
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Afwah  
NIM : 4515021017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul : **Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo**

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 24 Februari 2020

Pembimbing I

  
Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC

Pembimbing II

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan Fisipol  
Universitas Bosowa

  
Arief Wicaksono, S.IP, M.A

Ketua Jurusan  
Administrasi Negara

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, skripsi dengan judul **“Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo”**

Nama : Afwah  
NIM : 4515021017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

### PANITIA UJIAN

Ketua

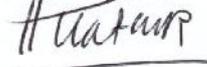
Sekretaris

  
Arief Wicaksono, S.IP, M.A  
Dekan Fisipol Universitas Bosowa

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si  
Ketua Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara

### TIM PENGUJI

1. Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si.
4. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afwah  
NIM : 4515021017  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas  
Bosowa Makassar  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Program Kampung KB Dalam  
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Keluarga  
di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara  
Timur Kota Palopo

Saya mengatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulis skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 Februari 2020



Penulis  
Afwah  
4515021017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Implementasi Program Kampung Kb Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan politik Universitas Bosowa Makassar.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penyusun mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda Suharti, Ayahanda Amiruddin, Adik-adik tercinta Afriansyah dan Annisa, Tante Ica dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC selaku Pembimbing I dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Ir Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A selaku Dekan Fakultas
3. Ibu Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Makassar
4. Seluruh Dosen yang telah memberikan pelajaran dan tambahan ilmu bagi penulis selama menjalani perkuliahan
5. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam kepengurusan administrasi.
6. Kantor Kelurahan Pontap Palopo yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
7. Para staf Kantor Kelurahan Pontap Palopo yang telah memberikan dukungan dan informasi pada penelitian ini.
8. Saudara-saudariku Administrasi Negara 2015 Universitas Bosowa Makassar.
9. Sahabatku Sandra Batti, Gebby Victoria, Apriliyanti, Devi, Gugun, yang tak pernah bosan mengingatkan penulis.
10. Terima kasih pula teman-teman KKN-KWU Universitas Bosowa Angkatan 45 terkhususnya Desa Bonto Tangnga, Kalian luar biasa.
11. Kepada yang terbanggakan Universitas Bosowa Makassar yang telah memberi penulis ruang untuk menimba ilmu.

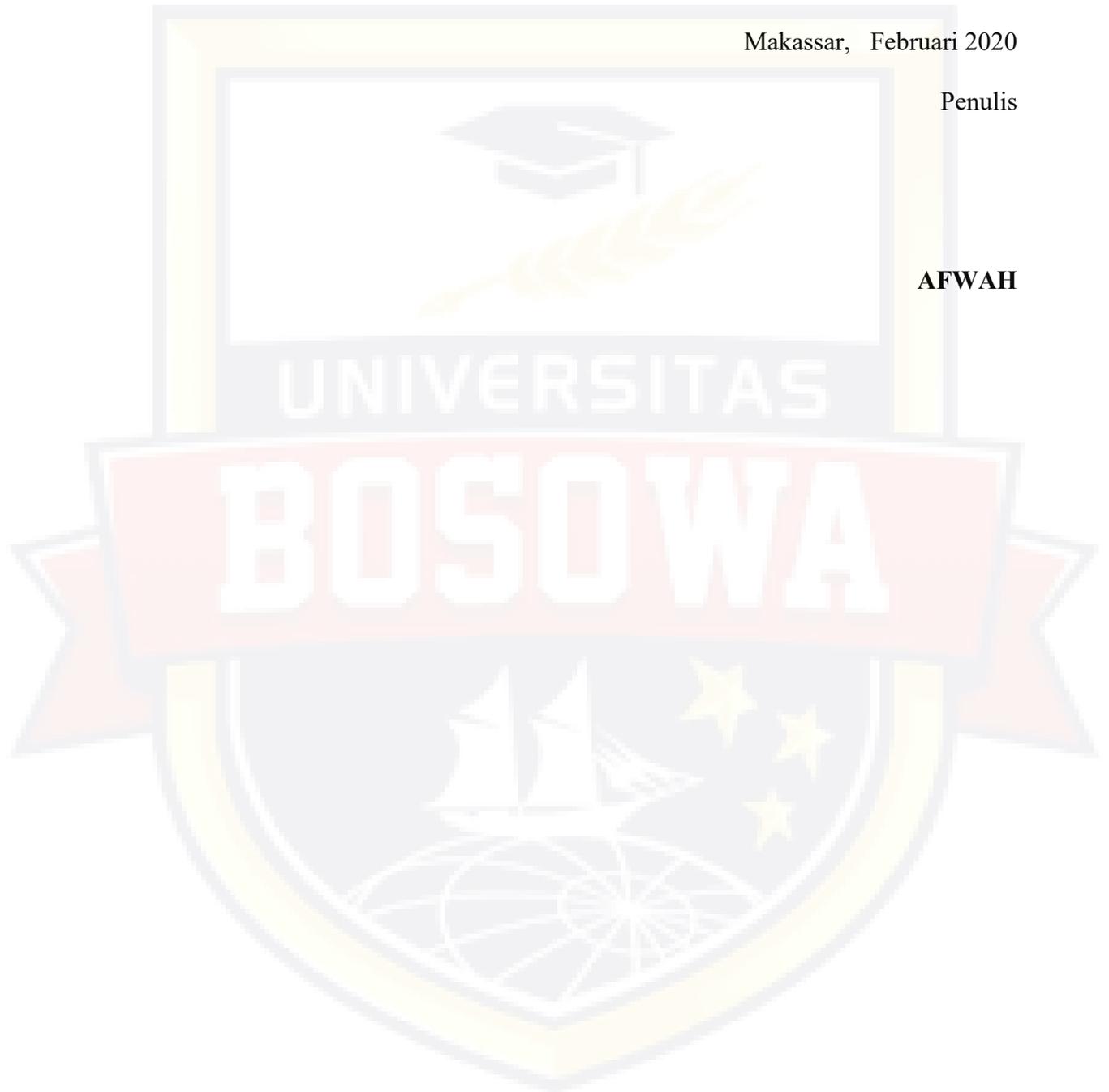
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

Makassar, Februari 2020

Penulis

**AFWAH**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian .....	4
4. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
1. Konsep Implementasi.....	6
2. Konsep Keluarga Berencana.....	10
3. Konsep Kualitas Hidup.....	12
4. Konsep Kesejahteraan Keluarga .....	15
5. Kerangka Konseptual.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	19
1. Pendekatan Penelitian .....	19
2. Lokasi Penelitian.....	19

3.	Sumber Data.....	19
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	20
5.	Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		23
1.	Gambaran Umum Pelaksanaan Program KB .....	23
	A.1. Keadaan Penduduk .....	28
	A.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	31
	A.3. Jumlah PUS Berdasarkan Kesertaan Ber KB .....	32
	A.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	34
	A.5. Peranan dan Fungsi Pengurus Kampung KB .....	34
2.	Pelaksanaan Program Kampung KB.....	40
	B.1. Solusi .....	40
	B.2. Pemahaman Warga Terhadap Program.....	46
3.	Solusi Pelaksanaan Program KB .....	52
	C.1. Intensivitas Sosialisasi Program .....	52
	C.2. Pembinaan .....	54
	C.3. Pengembangan .....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....		63
DAFTAR PUSTAKA .....		67
LAMPIRAN.....		70

## ABSTRAK

Afwah, 4515021017, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, *Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*. Dibimbing oleh Ade Ferry Afrisal dan Nining Haslinda Zainal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan kunci berjumlah 4 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive*. Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, panyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian dengan fokus 1) Pelaksanaan Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yaitu belum optimal dan pelaksanaan program dapat dikatakan belum efektif, dilihat dari indikator (a) Sosialisasi, masih perlu ditingkatkan (b) Pemahaman Warga Terhadap Program, pentingnya sanitasi, PHBS dan pemberian Asi eksklusif pada bayi balita perlu ditingkatkan. 2) Solusi Pelaksanaan Program Kampung KB Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yaitu secara indikator (a) Intensivitas sosialisasi, sesuai standar aturan dengan tujuan pelayanan publik yang

efektif (b) Pembinaan kelompok dan keluarga dapat dikatakan belum efektif (c)

Pengembangan program yang perlu ditingkatkan.

***Kata Kunci : Implementasi, Kampung KB, Kesejahteraan Keluarga.***



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan yang menyerang negara berkembang sangatlah kompleks. Khususnya pada kesejahteraan rakyat. Salah satu pemicu rendahnya tingkat kesejahteraan warga merupakan sebab terdapatnya ketimpangan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi serta kesehatan. (Radianto: 1, 2015)

Permasalahan kependudukan ini juga menjadi salah satu kasus yang serius yang melanda Indonesia. Permasalahan kependudukan yang begitu rumit sangat mempengaruhi aspek ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan warga untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan keluarga agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya banyaknya kemiskinan yang terjadi, perkembangan penduduk yang sangat pesat pula berdampak pada ledakan penduduk. Permasalahan tersebut yang menjadi asal mula dikeluarkannya Program Keluarga Berencana (KB), (Pramithasari, 2015). KB merupakan sebuah program yang digunakan sebagai alternatif untuk menekankan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Program KB ini lahir berdasarkan kebijakan pemerintah. Keseriusan Pemerintah tersebut dalam menggalakkan program KB, ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Menurut Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan tentang bagaimana mengatur atau mengendalikan tatanan kependudukan terkait dengan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk agar menjadi suatu tatanan penduduk yang merata dan berbanding dengan perekonomian masyarakat.

Program KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pula bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan ingin membantu masyarakat yang berpendapatan kecil dalam kesehariannya, sehingga warga tersebut bisa penuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Salah satu program dari pemerintah terkait dengan KB adalah Kampung KB. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, yang mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Program ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan warga.

Ditingkat daerah, Kampung KB juga dilaksanakan di Kota Palopo melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kepala Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) menjadi penanggungjawab utama masalah KB di Kota Palopo. Secara umum masalah yang terjadi dalam implementasi Program Kampung KB diantaranya kurang jelasnya pedoman pelaksanaan program, kurangnya sosialisasi program kurangnya tenaga penyuluh atau Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kondisi di lokasi penelitian kurang mendukung adanya program, pendidikan, pengalaman, pekerjaan, jenis

kelamin dan umur dari target sasaran masyarakat yang tidak sama sehingga sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya program kampung KB tersebut (Januar, 2017).

Hal sama juga terjadi di Kelurahan Pontap, Risa Haris (Penyuluh KB) mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi terbukti dengan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai program Kampung KB dari dinas PPKB kota Palopo. Dalam program Kampung KB terdapat Pokja (Kelompok Kerja), didalamnya terdiri dari dinas kesehatan, dinas PPKB dan dinas pendidikan. Adapun tugas dari Pokja menjalankan sosialisasi program Kampung KB yang ada di Kelurahan Pontap.

Pola pikir yang sudah tertanam pada target sasaran masyarakat yaitu *“banyak anak banyak rejeki”* juga merupakan faktor penghambat masuknya program Kampung KB. Lewat program KB ini pemerintah berharap terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), yaitu keluarga dengan Dua anak sebagai tujuannya. Pemerintah terus memotivasi, menghimbau, dan menekankan kepada masyarakat agar memiliki keluarga kecil dengan slogan KB, *“Dua Anak Lebih Baik”*.

Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan langkah koordinasi lintas sector terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB ini.

Hakikat Kampung KB terbagi menjadi 3, yaitu;

- 1) Kampung menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB
- 2) Pembinaan kelangsungan ber KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran
- 3) Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo?
2. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar Program Kampung KB dapat diterima dan berjalan dengan baik di masyarakat pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan agar Program Kampung KB dapat diterima dan berjalan dengan baik di masyarakat pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hasilnya dapat digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang program Kampung KB yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya bagi mahasiswa Kesejahteraan Sosial yang tertarik melakukan penelitian tentang program kampung KB guna mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Implementasi

Konsep teori yang digunakan adalah teori implementasi, teori keluarga berencana, pelayanan publik dan teori kesejahteraan keluarga.

##### a. Pengertian Impementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi ialah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* yaitu:

“Implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasannya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislative, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan keputusan peradilan atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhinya.” (Edwards III, 1980:01)

Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Tachjan

mengatakan implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Publik* bahwa:

“Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif- alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro” (Tachjan, 2006:25).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. (1983:139)

Menurut pernyataan tersebut, bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan selesai dirumuskan. Implementasi merupakan tahap paling penting karena pada tahap ini kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak.

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
  2. Program yang dilaksanakan
  3. Target atau kelompok sasaran
- b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, ialah isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan

implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) Sepanjang mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, warga di daerah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih ataupun perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang dipunya oleh para aktor yang ikut serta dalam implementasi kebijakan;
- Karakteristik institusi serta rejim yang sedang berkuasa;
- Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok target. (2002:21)

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut wajib bisa teratasi secepat mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya terdapat banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang ikut serta, namun juga disebabkan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual ataupun variabel organisasional, serta tiap-tiap variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa:

“Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.  
(*Ibid*: 179)

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses

implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

*a.* Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

*b.* Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis.

## **B. Konsep Keluarga Berencana**

### **a. Pengertian Keluarga Berencana**

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bias dilakukan dengan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran.

Keluarga Berencana adalah upaya ikhtiar untuk memberikan jaminan kesehatan untuk sang anak maupun ibu, jaminan pendidikan, karena pendidikan merupakan bekal yang sangat berharga untuk kehidupan kelak dalam masyarakat, untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga lahir dan batin. (Mukti Ali; 1974)

Keluarga Berencana adalah menjarangkan kehamilan yang diusahakan mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dengan menggunakan alat kontrasepsi. (Sarwono Prawiroharjo; 2015)

Program keluarga berencana tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kaca mata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga.

Menurut *Who Expert Commite* (1970) dalam Pinem (2009) keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk:

1. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
2. Mengatur interval diantara kelahiran
3. Mengatur waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri
4. Menentukan jumlah anak dalam keluarga

Menurut undang-undang RI nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

1. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
2. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana.
4. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan

Strategi program KB terbagi dalam dua hal, yaitu:

1. Strategi dasar
2. Strategi operasional

#### **Strategi Dasar**

- Meneguhkan kembali program di daerah
- Menjamin kesinambungan program

#### **Strategi Operasional**

- Peningkatan kapasitas system pelayanan program KB Nasional
- Peningkatan kualitas dan prioritas program
- Penggalangan dan pemantapan komitmen
- Dukungan regulasi dan kebijakan
- Pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas pelayanan

## C. Konsep Kualitas Hidup

### 1. Definisi Kualitas Hidup

WHOQoL Group (dalam Billington dkk, 2010) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu dari posisi individu dalam kehidupan dalam konteks sistem budaya dan nilai dimana hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan standart dan kekhawatiran. Kualitas hidup adalah konsep yang luas mulai terpengaruh dengan cara yang kompleks dengan kesehatan fisik individu, keadaan psikologis, keyakinan pribadi, hubungan sosiasl dan individu dengan fitur-fitur penting dari lingkungan individu.

Menurut WHO (1996) kualitas hidup atau *Quality of Life* adalah persepsi individual tentang posisi di masyarakat dalam konteks nilai dan budaya terkait adat setempat dan berhubungan dengan keinginan dan harapan yang merupakan pandangan multidimensi, yang tidak terbatas hanya dari fisik melainkan dari aspek psikologis. Sedangkan, kualitas hidup menurut *World Health Organization of Life (WHOQoL) Group* (dalam Fitriana dan Ambriani, 2012), didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup, dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian seseorang.

WHOQoL Group (Power, 2003) kualitas hidup merupakan persepsi individu, dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai dimana individu memiliki tujuan, harapan, standarisasi dan rasa kekhawatiran. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kepuasan, hubungan sosial dan hubungan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap posisi individu di dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hidup berkaitan dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang menjadi perhatian individu.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup menurut Moons, Marquet, Budst, & de Geest (2012) dalam konseptualisasi yang dikemukakannya, sbb:

### **a. Jenis Kelamin**

Moons, Marquet, Budst, dan de Geest (2004) mengatakan bahwa gender adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Bain, dkk (2003) menemukan adanya perbedaan antara kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan, dimana kualitas hidup laki-laki cenderung lebih baik daripada kualitas hidup perempuan. Fadda dan Jiron (1999) mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran-peran serta akses dan kendali terhadap berbagai sumber sehingga kebutuhan atau hal-hal yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda.

### **b. Usia**

Moons, Marquet, Budst, dan de Geest (2004) dan Dalkey (2002) mengatakan bahwa usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Wagner, Abbot, & Lett

(2004) menemukan adanya perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu.

c. Pendidikan

Moons, Marquet, Budst dan de Geest (2004) dan Baxter (1998) mengatakan bahwa tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup subjektif.

d. Pekerjaan

Moons, Marquet Budst, dan de Geest (2004) mengatakan bahwa terdapat perbedaan kualitas hidup antara penduduk yang berstatus sebagai pelajar, penduduk yang bekerja, penduduk yang tidak bekerja dan penduduk yang tidak mampu bekerja.

e. Status pernikahan

Moons, Marquet dan Budst dan de Geest (2004) mengatakan bahwa terdapat perbedaan kualitas antara individu yang tidak menikah, individu bercerai ataupun janda, dan individu yang menikah atau kohabitasi.

f. Penghasilan

Testa dan Simonson (1996) menjelaskan bahwa Bidang penelitian yang sedang berkembang dan hasil penilaian teknologi kesehatan mengevaluasi manfaat, efektivitas biaya, dan keuntungan bersih dari terapi, hal ini dilihat dari penilaian perubahan kualitas hidup secara fisik, fungsional, mental dan kesehatan sosial dalam rangka untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari program baru dan inervensi.

## **D. Konsep Kesejahteraan Keluarga**

### **a. Pengertian Kesejahteraan Keluarga**

Kesejahteraan keluarga terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spritual yang diliputi oleh rasa kesehatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaiknya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban sesuai pancasila.

Kesejahteraan menurut Sulastri dalam Solih (1986: 14) menggambarkan kemajuan atau kesuksesan di dalam hidup baik secara materil, mental spiritual, dan sosial secara seimbang, sehingga menimbulkan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga dapat menyongsong kehidupan mendatang dengan gembira dan optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan menurut Friedman (1998: 12), keluarga merujuk kepada dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan – ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang menidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga.

Menurut Solih (1986: 14-15) keluarga yang sejahtera dan bahagia adalah keluarga yang dapat mencapai kesuksesan di dalam hidupnya, baik materil maupun mental spiritual, yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada para anggota keluarga dalam situasi penuh kebahagiaan dan ketenteraman hidup bersama.

Jadi kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi di mana kehidupan secara materil, mental spiritual, dan sosial dapat dipenuhi secara seimbang bagi para anggota keluarga dalam situasi penuh kebahagiaan dan ketenteraman hidup bersama.

Adapun indicator kesejahteraan keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2010:

#### 1. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

#### 2. Keluarga Sejahtera I

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi yaitu:

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur
- Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru pertahun
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap pengguna rumah

- Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat
- Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas, penghasilan tetap
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin
- Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini

### 3. Keluarga Sejahtera II

Keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*), juga telah memenuhi seluruh kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*development needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

### 4. Keluarga Sejahtera III

Keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*), psikologis (*psychological needs*) dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi indikator aktualisasi diri (*self esteem*), seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial serta berperan aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

### 5. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat dasar, psikologis maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

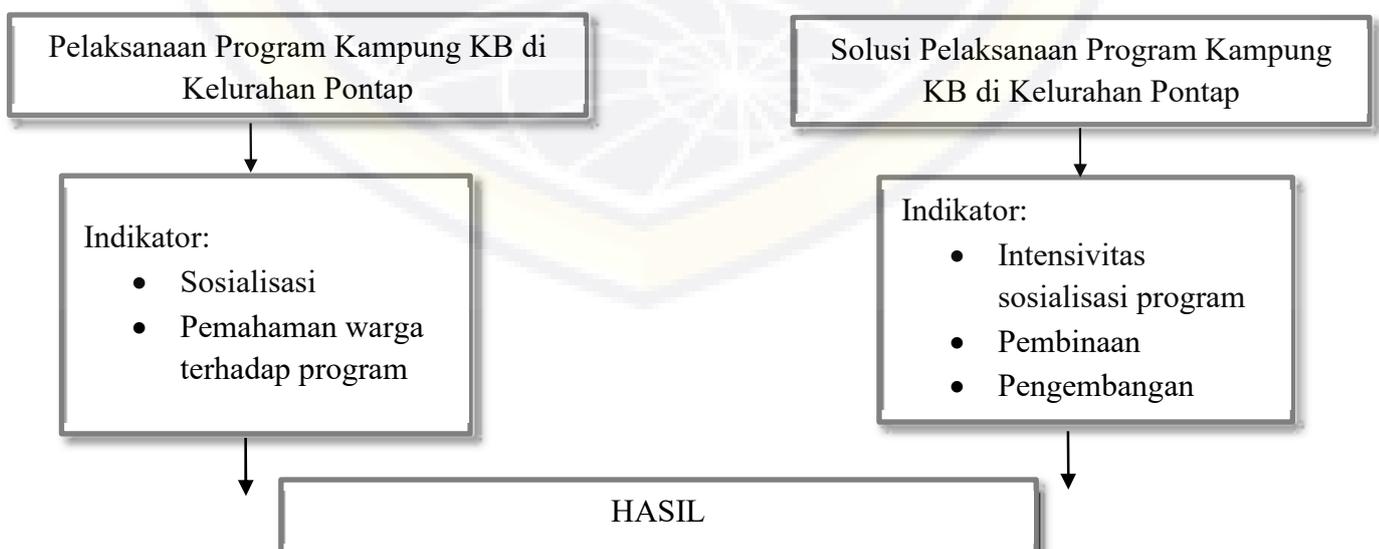
Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN merupakan salah satu Kantor Pemerintah dimana suatu sektor yang berperan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Salah satu program dari BKKBN yaitu kampung KB. Yang menjadi indikator dalam pelaksanaan program Kampung KB ialah sosialisasi, pedoman dan pemahaman warga terhadap program. Namun yang terjadi dilapangan saat ini pelaksanaan program tersebut belum berjalan optimal.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017; 15), solusi yang perlu dilakukan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik didasarkan pada intensivitas sosialisasi program, pembinaan dan pengembangan program.

Tabel 1. Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian tentang Implementasi Kampung KB dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo penulis menggunakan pendekatan kualitatif di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi mengenai Implementasi Kampung KB di kawasan pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur dalam meningkatkan kualitas hidup.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Pesisir Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih Kelurahan Pontap khususnya implementasi Kampung KB adalah adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pelaksanaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan keluarga di kawasan tersebut.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data peneliti yang dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimanapun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara *face to face* untuk

mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dapat menggambarkan hasil penelitian lebih muda.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang bersal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian serta penelusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas internet.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan ini terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian.

#### 2. Wawancara mendalam

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan *face to face* kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini di kenal dengan teknik wawancara *deep interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Lurah Pontap
- b) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)
- c) Pengelola Kampung KB (Penyuluh KB)
- d) Tokoh Masyarakat/Pasangan Usia Subur/Kader

### 3. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi/masyarakat untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber data yang tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet, dan lain-lain.

### E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk

mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui program Kampung KB di kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Data dari hasil wawancara yang di peroleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur**

Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan struktur yang lama ialah penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Pengelolaan program KB ditingkat Provinsi masih tetap diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi vertikal. Sejak tahun 2003.

Operasional Pendataan serta Pemetaan Keluarga dalam Kampung KB dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pendataan Keluarga (PK) yang dilaksanakan secara Nasional, kemudian dianalisa untuk kepentingan kegiatan di masing-masing seksi diantaranya:
  - a. Sasaran Pelayanan Kependudukan;
  - b. Sasaran Pelayanan Program KB;
  - c. Sasaran Pelayanan Program Ketahanan Keluarga;
  - d. Sasaran Pelayanan pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - e. Sasaran Perbaikan Rumah Layak Huni;
  - f. Sasaran Peningkatan Kesehatan Lingkungan;
  - g. Sasaran Pencegahan Narkoba;
  - h. Dan lain-lain.

Contoh:

- 1) Bila dikampung tersebut terdapat keluarga yang belum memiliki Akta Kelahiran, maka dijadikan sebagai sasaran KIE dan Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kelahiran
  - 2) Bila dikampung tersebut terdapat sejumlah PUS yang belum ber-KB (dengan berbagai alasan), maka PUS tersebut dijadikan sebagai sasaran untuk mendapatkan pelayanan KB melalui kegiatan KIE dan pelayanan Kontrasepsi
  - 3) Bila dikampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki Balita, sementara di Kampung tersebut belum memiliki kelompok BKB, maka di kampung tersebut dapat dijadikan sasaran untuk pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita
  - 4) Bila dikampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, maka keluarga tersebut dijadikan sebagai sasaran untuk gotong royong masyarakat kampung dalam membangun rumah layak huni dengan dukungan dari lintas sektor.
2. Masing-masing seksi melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan yang belum tercantum dalam pendataan nasional (Pendataan Keluarga), misalnya:
- 1 Pendataan tingkatan Profesi masing-masing keluarga misalnya: Petani (buruh tani, penggarap), Pedagang dengan jenis produksinya, Tukang Bangunan dan Klasifikasi Sopir dsb.
  - 2 Produk unggulan masing-masing keluarga (Anyaman, Kerajinan, dsb)
  - 3 Pendataan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan
    - Belum punya kantor RW/Bale Sawala/Bale Kampung
    - Membangun gang/jalan/lorong

- Organisasi-organisasi yang dibutuhkan.

4 Pendataan lainnya tentang masalah dan potensi desa yang diperlukan.

Petemuan ditingkat RT minimal dilaksanakan setiap tiga bulan sekali (atau sesuai kebutuhan masyarakat) dipimpin oleh Ketua RT. Dilaksanakan setelah selesai analisa pendataan. Hal-hal yang dibicarakan adalah:

- Membahas hasil pendataan kemudian dituangkan dalam peta keluarga tingkat RT
- Membahas masalah-masalah dan potensi yang ada ditingkat RT
- Menyusun Program Kerja yang akan dibawa/diusulkan di dalam rapat RW/Kampung
- Melaksanakan lelang kepedulian untuk membangun rumah prasejahtera (tidak layak huni).

Sampai dengan sekarang mengenai pengelolaan program KB ada dua lembaga sebagai pelaksananya, yaitu;

1. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Kota Palopo sebagai instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN Kota Palopo adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap sebagai instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan program KB di Kota Palopo.
2. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pengelolanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## Letak Geografis

Kelurahan Pontap adalah salah satu Kelurahan yang tereak pada kawasan pesisir Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, dengan posisi geografis  $02^{\circ}53'15''$  –  $03^{\circ}04'08''$  LS dan  $120^{\circ}03'10''$  -  $120^{\circ}14'34''$  BT. Adapun batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Peggoli, Kecamatan Wara Utara
- Sebelah Selatan : Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara

Kelurahan Pontap memiliki luas  $4,63 \text{ Km}^2$  yang merupakan kelurahan terluas kelima dari tujuh kelurahan di Kecamatan Wara Timur.

Visi dan Misi BKKBN Kota Palopo

Visi dan misi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kota Palopo adalah:

a. Visi

Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas

b. Misi

- 1) Mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- 3) Memfasilitasi pembangunan keluarga



### A.1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dikategorikan dalam beberapa kelompok umur. Terdapat 4 RW yang masing-masing jumlah jiwa dalam keluarga berbeda.

**Tabel 4.1 Jumlah Jiwa Perempuan Tahun 2016 Dari Hasil Pendataan Keluarga**

NO	RW	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	JUMLAH JIWA PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN)																
			0 - < 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	RW 01	1.054	11	75	110	150	116	97	76	94	76	71	51	43	18	21	18	12	15
2.	RW 02	608	1	44	63	52	61	66	54	59	34	39	33	30	25	11	15	10	11
3.	RW 03	803	6	69	83	86	83	97	79	70	54	40	48	25	21	14	6	9	13
4.	RW 04	714	2	47	61	72	54	61	67	52	54	50	47	34	38	26	23	10	16
KELURAHAN		3.197	20	235	317	360	314	321	276	275	218	200	179	132	102	72	62	41	55

Berdasarkan tabel 4.1, pada kelurahan Pontap data Tahun 2016 jumlah jiwa perempuan pada RW 01 memiliki jumlah jiwa terbanyak yaitu 1.054, dan pada RW 02 memiliki jumlah jiwa paling sedikit yaitu 608 jiwa. Sedangkan pada usia 10-14 tahun memiliki jumlah jiwa terbanyak yaitu 360 dan pada usia 70-74 tahun memiliki jumlah jiwa paling sedikit yaitu 55.

**Tabel 4.2 Jumlah Jiwa Perempuan Tahun 2019 Dari Hasil Pendataan Keluarga**

NO	RW	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	JUMLAH JIWA PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN)																
			0 - < 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	RW 01	707	0	21	57	75	98	84	60	55	66	41	53	30	17	10	12	12	16
2.	RW 02	355	0	9	23	35	37	39	27	36	26	20	27	14	21	10	11	7	13
3.	RW 03	607	0	19	53	61	63	71	65	48	56	44	40	19	18	18	13	3	16
4.	RW 04	191	0	3	17	16	18	21	17	17	12	9	12	8	8	8	10	8	7
KELURAHAN		1.860	0	52	150	187	216	215	169	156	160	114	132	71	64	46	46	30	52

Berdasarkan tabel 4.2 pada tahun 2019 jumlah jiwa perempuan pada rw 01 memiliki jumlah jiwa terbanyak yaitu 707 jiwa, dan pada rw 04 memiliki jumlah jiwa paling sedikit yaitu 191 jiwa.

Jumlah Jiwa Laki-laki Tahun 2016 berdasarkan kelompok usia dikategorikan dalam beberapa kelompok umur. Terdapat 4 RW yang masing-masing jumlah jiwa dalam keluarga berbeda, rw 01 memiliki jumlah jiwa 1.089, rw 02 memiliki jumlah jiwa 639, rw 03 memiliki jumlah jiwa 893 dan rw 04 memiliki jumlah jiwa 747 yang mana jumlah jiwanya menurut kelompok umur mulai dari 0-75 tahun.

**Tabel 4.3 Jumlah Jiwa Laki-laki Tahun 2016 Dari Hasil Pendataan Keluarga**

NO	RW	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	JUMLAH JIWA LAKI-LAKI DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN)																
			0 - < 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	RW 01	1.089	6	80	107	139	136	113	95	87	90	68	53	35	33	11	13	8	15
2.	RW 02	639	6	46	80	64	62	51	58	73	52	36	33	18	27	12	14	3	4
3.	RW 03	893	6	82	90	112	95	94	103	78	52	48	45	31	25	12	7	7	6
4.	RW 04	747	6	57	82	81	68	67	62	74	54	53	39	27	24	22	11	10	10
KELURAHAN		3.393	22	265	359	396	361	325	318	312	248	205	170	111	119	57	45	28	35

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah jiwa laki-laki tahun 2016 pada rw 01 memiliki jumlah jiwa terbanyak, yaitu 1.089 jiwa dalam keluarga, sedangkan pada rw 02 hanya memiliki jumlah jiwa 639 jiwa. Pada range umur 10-14 tahun memiliki jumlah paling terbanyak yaitu 396 dan pada range umur 70-74 memiliki jumlah jiwa paling sedikit yaitu 28 saja.

**Tabel 4.4 Jumlah Jiwa Laki-laki Tahun 2019 Dari Hasil Pendataan Keluarga**

NO	RW	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	JUMLAH JIWA LAKI-LAKI DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN)																
			0 - < 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	RW 01	679	0	12	56	75	86	71	68	68	51	53	47	30	20	17	9	9	7
2.	RW 02	372	0	14	35	45	41	30	26	30	42	31	18	17	17	6	10	5	5
3.	RW 03	686	0	20	70	68	86	82	65	68	54	41	42	31	23	12	11	4	9
4.	RW 04	208	0	7	24	20	29	17	15	20	21	10	8	10	6	4	6	4	7
KELURAHAN		1.945	0	53	185	208	242	200	174	186	168	135	115	88	66	39	36	22	28

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah jiwa laki-laki tahun 2016 pada rw 01 memiliki jumlah jiwa terbanyak, yaitu 679 jiwa dalam keluarga, sedangkan pada rw 04 memiliki jumlah jiwa paling sedikit yaitu 208 jiwa. Pada range umur 15-19 tahun memiliki jumlah paling terbanyak yaitu 242 dan pada range umur 70-74 memiliki jumlah jiwa paling sedikit yaitu 22.

### A.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu; tidak tamat SD/MI, masih SD/MI, tamat SD/MI. Pada SLTP/MTSN terbagi menjadi 2, masih SLTP/MTSN dan tamat SLTP/MTSN. Pada SLTA/MA terbagi menjadi 2, masih SLTA/MA dan tamat SLTA/MA. Pada PT/Akademi juga terbagi menjadi 2 bagian, masih PT/Akademi dan tamat PT/Akademi, adapun jumlah total bersekolah dan tidak/belum bersekolah.

**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Hasil Pendataan Keluarga**

No	Rw	Sekolah										Total	
					SLTP/MTSN		SLTA/MA		PT/Akademi		Total Bersekolah		Tidak/ Belum Sekolah
		Tidak tamat SD/MI	Masih SD/MI	Tamat SD/MI	Masih SLTP/MTSN	Tamat SLTP/MTSN	Masih SLTA/MA	Tamat SLTA/MA	Masih PT/Akademi	Tamat PT/Akademi			
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(21)	(23)	(25)
1.	Rw 01	88	176	310	88	192	79	249	21	68	1.271	115	1.386
2.	Rw 02	19	91	129	47	101	29	179	17	41	653	74	727
3.	Rw 03	23	153	307	63	174	67	267	16	54	1.124	169	1.293
4.	Rw 04	3	44	65	32	50	23	132	1	9	359	40	399
Kelurahan		133	464	811	230	517	198	827	55	172	3.407	398	3.805

Pada tabel 4.5 berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tidak tamat SD/MI berjumlah 133 jiwa, sedangkan masih SD/MI berjumlah 464 jiwa, dan yang sudah tamat SD/MI berjumlah 811 jiwa. Jumlah SLTP/MTSN yang masih sekolah berjumlah 230 jiwa dan yang tamat SLTP/MTSN berjumlah 517 jiwa. Kemudian jumlah jiwa SLTA/MA yang masih bersekolah berjumlah 198 jiwa dan yang sudah tamat SLTA/MA berjumlah 827 jiwa. Lalu pada PT/Akademi yang masih sekolah berjumlah 55 jiwa dan yang tamat PT/Akademi berjumlah 172 jiwa. Jadi, dari data tabel 4.5 diatas jumlah jiwa yang paling terbanyak ada di tamat SLTA/MA.

### A.3. Jumlah PUS Berdasarkan Kesertaan Ber-KB

Jumlah pasangan usia subur beradaskan kesertaan ber KB terbagi menjadi beberapa bagian. Mulai dari jumlah PUS nya pada masing-masing rw. Pada rw 01 memiliki jumlah PUS 325, pada rw 02 memiliki jumlah PUS 184, pada rw 03 memiliki jumlah PUS 293, dan pada rw 04 memiliki jumlah PUS 201. Adapun pada table kesertaan ber KB ini dibagi menjadi 3 bagian yang mana ada sedang, pernah dan tidak pernah ber KB.

**Tabel 4.6 Jumlah PUS Berdasarkan Kesertaan Ber-KB Tahun 2016  
Dari Hasil Pendataan Keluarga**

NO	RW	PUS	SEDANG		PERNAH		TIDAK PERNAH	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1.	RW 01	325	184	47,12%	49	15,08%	92	28,31%
2.	RW 02	184	88	47,83%	45	24,46%	51	27,72%
3.	RW 03	293	200	68,26%	38	12,97%	55	18,77%
4.	RW 04	201	133	66,17%	27	13,43%	41	20,40%
KELURAHAN		1.011	609	60,24%	159	15,73%	243	24,04%

Berdasarkan tabel 4.6 jumlah pasangan usia subur (PUS) tahun 2016 pada rw 01 memiliki jumlah PUS terbanyak, yakni 325. Sedangkan pada rw 02 memiliki jumlah PUS paling sedikit yakni 184. Berdasarkan data diperoleh pada rw 03 memiliki jumlah terbanyak yang sedang melakukan ber KB yakni 293 PUS, rw 02 memiliki jumlah paling kecil melakukan kesertaan ber KB yakni hanya 88 PUS.

**Tabel 4.7 Jumlah PUS Berdasarkan Kesertaan Ber-KB Tahun 2019  
Dari Hasil Pendataan Keluarga**

NO	RW	PUS	KESERTAAN BER-KB					
			SEDANG		PERNAH		TIDAK PERNAH	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1.	RW 01	211	119	56,40%	25	11,85%	67	31,75%
2.	RW 02	97	56	57,73%	15	15,46%	26	26,80%
3.	RW 03	205	157	76,59%	19	9,27%	29	14,15%
4.	RW 04	48	33	68,75%	5	10,42%	10	20,83%
KELURAHAN		561	365	65,06%	64	11,41%	132	23,53%

Berdasarkan tabel 4.8 jumlah PUS tahun 2019 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pada rw 01 memiliki jumlah pus terbanyak yakni sebesar 211 dengan presentase sedang ber KB sebanyak 119, pernah ber KB sebanyak 25, dan tidak pernah ber KB sebanyak 67. Rw 02 memiliki jumlah pus paling sedikit yakni 97 dengan presentase sedang ber KB 56, pernah ber KB 15, dan tidak pernah ber KB 26.

#### A.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pekerjaan pada tahun 2019 terbagi dalam beberapa kelompok jenis pekerjaan, yakni; petani, nelayan, pedagang, pns/tni/polri, pegawai swasta, wiraswasta, pensiunan, dan pekerja lepas.

**Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2019 Dari Hasil Pendataan Keluarga**

No	Rw	Bekerja										Tidak/ Belum bekerja	Total
		Petani	Nelayan	Pedagang	Pns/tni/polri	Pegawai swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja lepas	Lainnya	Jumlah bekerja		
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(21)	(23)	(25)
1.	Rw 01	19	113	19	40	69	8	48	229	0	545	841	1.386
2.	Rw 02	2	39	14	30	70	3	18	78	0	254	473	727
3.	Rw 03	16	109	8	32	112	8	48	74	0	407	886	1.293
4.	Rw 04	1	4	22	16	39	3	47	28	0	160	239	399
Kelurahan		38	265	63	118	290	22	161	409	0	1.366	2.439	3.805

Berdasarkan tabel 4.7 mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019 bisa dilihat bahwa masyarakat yang belum bekerja memiliki jumlah angka terbanyak sebesar 2.439, selain itu pekerja lepas juga menjadi angka tertinggi yakni sebanyak 409. Kelurahan pontap terletak pada kawasan pesisir, terlihat seperti gambaran tabel diatas angka pekerja nelayan cukup tinggi dengan jumlah 265 penduduk.

#### A.5 Peranan dan Fungsi Pengurus Kampung KB

Adapun peranan/fungsi pengurus Kampung KB sebagai berikut:

1. Penanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembuatan pengembangan serta operasional Kampung KB.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Kampung KB dengan sektor terkait.
- c. Mengusahakan anggaran dari dana Desa dan pihak luar untuk keperluan Kampung KB.

2. Penasehat:

- a. Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam membina mengembangkan Kampung KB

b. Seksi Pendidikan/Sosialisasi antara lain:

- Membentuk, membina dan mengembangkan BKB (Bina Keluarga Balita).
- Membentuk membina dan mengembangkan BKR (Bina Keluarga Remaja).
- Membantu membina dan mengembangkan BKL (Bina Keluarga Lansia).
- Membentuk membina dan mengembangkan PAUD (Pembelajaran Anak Usia Dini).
- Melaksanakan keaksaraan fungsional.
- Kursus-Kursus tentang keahlian baik yang dilaksanakan oleh dinas lembaga pemerintah ataupun atas prakarsa warga (Kursus Perbengkelan, Tata busana dan merias pengantin) dsb.
- Membina Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum).

- Mengusahakan hal-hal yang diperlukan bidang pendidikan/sosialisasi kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).

c. Seksi Reproduksi

- Memotivasi PUS untuk ber-KB.
- Membina kelangsungan warga untuk ber KB
- Menyelenggarakan pembentukan, pembinaan dan pengembangan posyandu.
- Membuat peta keluarga masing-masing RT.
- Mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi serta reproduksi anak muda.
- Pembentukan PIK Remaja dan Kampanye PUP.
- Melaksanakan pelayanan KB.
- Melaksanakan rujukan dan pengayoman medis.
- Penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu.
- Mengkordinasikan layanan dan Pembinaan peserta KB dengan Dokter Bidan Swasta.
- Pelayanan papsmear, pemeriksaan bumil dan imunisasi di Posyandu

d. Seksi Ekonomi

- Mempromosikan kemampuan/profesi yang dimiliki oleh warga kampung (memasarkan tukang tembok, sopir, penjahit dsb) ke Pasar kerja.

- Membina, membimbing produk-produk unggulan baik yang dibuat masing-masing keluarga ataupun dalam bentuk kelompok.
  - Membentuk membina dan mengembangkan usaha bersama baik UPPKS, UP2K dan KUBE.
  - Membentuk, membina dan mengembangkan Koperasi simpan pinjam berupa uang atau produk/hasil pertanian.
  - Menjalankan sistem lumbung kampung untuk kepentingan keluarga.
  - Iuran untuk permodalan dengan barang (palantir/Kelapa sebulan Satu butir) atau produk lain sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah masing-masing untuk kepentingan dan kebersamaan di kampung.
  - Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang ekonomi kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst)
- e. Seksi Perlindungan
- Penyuluhan anti KDRT.
  - Penyuluhan Narkoba.
  - Mengurus jaminan-jaminan kehidupan bagi keluarga (BPJS, Jamkesda).
  - Sistem ronda malam untuk perlindungan keamanan.

- Bantuan hukum untuk keluarga yang tersangkut masalah hukum.
- Ayoman sosial bagi peserta KB yang mendapat keluhan/komplikasi.
- Mengusahakan pelayanan administrasi kependudukan misalnya Akta Kelahiran dan KTP.
- Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang perlindungan kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).

f. Seksi Kasih Sayang

- Iuran kematian.
- Donor darah untuk menolong sesama.
- Jimpitan beras untuk menolong orang miskin.
- Membentuk kas untuk pertisipan KB yang tidak dapat membeli kontrasepsi.
- Jaminan Ibu bersalin (Jambulin) dan tabungan Ibu bersalin.
- Bapak asuh/Ibu asuh bagi anak yang tidak bersekolah.
- Pengumpulan dan pemberian pakaian layak pakai dari keluarga yang mampu kepada yang membutuhkan.
- Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang kasih sayang kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).

g. Seksi Sosial Budaya

- Menanamkan budaya budi pekerti di keluarga-keluarga sesuai tatakrama setempat.
- Memelihara dan mengembangkan tradisi yang baik yang menjadi kebiasaan setempat.
- Membentuk kelompok seni sesuai dengan kehendak bersama.
- Kampanye program-program pemerintah melalui seni budaya.
- Mengajarkan bahasa yang santun baik bahasa ibu maupun bahasa nasional.
- Menyelenggarakan lomba-lomba budaya baik antar individu, antar keluarga maupun antar RT.
- Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang sosial budaya kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst)

h. Seksi Pembinaan Lingkungan

- Kerja Bakti memelihara area lingkungan.
- Gerakan penanaman tumbuhan taman.
- Pembuangan sampah bersama serta pengurusan secara bergiliran (terjadwal).
- Penataan kampung baik pembuatan jalan, gang dan pagar-pagar yang membuat keserasian dan keindahan.

- Petunjuk-petunjuk jalan dan gang dengan nama yang disepakati.
- Masyarakat bergotong-royong membangun rumah layak huni.

### **B. Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pontap**

Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu aktivitas/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2015-2019, aktivitas tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia diseluruh tingkatan daerah.

Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima masyarakat.

#### **B.1. Sosialisasi**

Sosialisasi program Kampung KB tidak dapat berjalan dengan baik jika didalamnya tidak terdapat lintas sector. kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan

pemerintah daerah. Ketahanan dan kesejahteraan merupakan kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang disingkat NKKBS merupakan suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana.

Penyuluh KB kelurahan Pontap mengatakan bahwa sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat pada program Kampung KB ini;

“itu program Kampung KB kalau berjalan dengan sesuai aturan, mungkin Kampung KB kita ini pasti ada perubahan. Tapi masalahnya ini dari dinas yang tangani, seandainya dana berjalan dengan baik, kita sendiri yang kelola i mungkin bisa jadi bagus kalau menurut aturan itu to didalam Kampung KB itu ada namanya pertemuan kelompok kerja Kampung KB. Ada 8 itu pokja” (Ibu Anita, 13 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa program Kampung KB pada kelurahan Pontap belum berjalan sesuai dengan aturan dikarenakan adanya alokasi dana yang tidak berjalan dengan baik. Penyuluh Kampung KB juga mengatakan bahwa dalam Kampung KB terdapat pertemuan kelompok kerja.

Sosialisasi pertemuan kelompok kerja (pokja) Kampung KB dilaksanakan setiap sebulan sekali, dalam pertemuan pokja membahas tentang program kerja

yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan pembangunan di Kampung KB.

Musyawarah kelurahan Kampung KB dilaksanakan sekali dalam 2 bulan. Adapun tujuan dilakukannya musyawarah ini untuk rembulan sekaligus menampung aspirasi masyarakat Kampung KB dalam pelaksanaan program Kampung KB agar menjadi bermanfaat atau berdampak terhadap masyarakat Kampung KB.

Dari segi pendidikan juga masih menjadi salah satu masalah yang ada di Kampung KB Kelurahan Pontap, hal ini disampaikan langsung oleh penyuluh KB;

“Ee seperti ini seksi pendidikan, setelah kegiatan ini pokja Kampung KB, kita undang mi dari Dinas pendidikan, secara di kelurahan pontap ini masih banyak ada anak-anak yang tidak sekolah, makanya kami undang dari dinas pendidikan sebagai narasumber, apa solusinya ini anak-anak kami supaya bisa mendapatkan pendidikan, to’. Apakah dikasih ikut paket C atau bagaimana bagaimana anunya pemerintah dari dinas pendidikan yang terkait to itu mi yang mereka anu nanti bagaimana caranya” (Penyuluh KB, 13 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas masih banyak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah pada kelurahan Pontap, dalam hal ini pihak penyuluh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar dapat ditemukan solusi untuk anak-anak yang tinggal di kawasan pesisir tersebut.

Kelurahan Pontap berada di kawasan pesisir Kota Palopo, sehingga masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah berada di wilayah tersebut, hal ini disampaikan oleh salah satu penyuluh KB

“Sebenarnya bagus sekali ini Kampung KB, terus seumpama di masyarakat kita ini masih banyak warga yang miskin, karna memang itu

rata-rata kalau daerah pesisir itu kan rata-rata kan berpenghasilan rendah, makanya diundang itu dari dinas social, apa solusinya ini masyarakat yang miskin to. Dikasih ka tambahan modal untuk usaha supaya mereka bisa hidup dengan layak. Begituji sebenarnya, seandainya itu berjalan dengan baik, itumi kendalanya kami dilapangan to.” (Ibu Anita, 13 September 2019)”

Pertemuan lokakarya mini lintas sektoral pada Kelurahan Pontap dilaksanakan sekali dalam 2 bulan, hal ini bertujuan untuk membangun sinergitas atau kerjasama dalam mempromosikan program Kampung KB sekaligus melaksanakan program kerja yang telah disusun oleh pokja Kampung KB, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dinal social, dll.



Sumber; Dokumentasi Lokasi Kampung KB Kelurahan Pontap (13, September 2019)

Dari hasil sosialisasi di kelurahan Pontap, warga mendukung dalam bentuk Motto Kampung KB *Dua Anak Cukup* yang digambar khusus di rumah warga sebagai tanda bahwa Kelurahan Pontap merupakan salah satu Kampung KB. Harapanya dengan dua anak, keluarga mempunyai kesempatan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, kecerdasan, dan ekonomi untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berkualitas.

Perkembangan program KB saat ini bukan saja untuk menurunkan angka kelahiran, tetapi mewujudkan bonus demografi yang berkualitas, dan generasi berkualitas masa depan, kuncinya adalah kesejahteraan keluarga atau ekonominya baik, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan pendidikan anak-anak terpenuhi.



Sumber; Dokumentasi Lokasi Kampung KB Kelurahan Pontap (13, September 2019)

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pergantian atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terkait batasan usia menyebutkan batas usia perkawinan antara laki-laki serta perempuan merupakan sama, yaitu 19 tahun. Undang-undang usia pernikahan yang ideal menurut Badan Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan 21 tahun untuk perempuan serta 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini tidak melanggar batasan usia baru pernikahan yang telah ditetapkan karena di atas 19 tahun. Dari segi kesehatan, usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi pria telah matang secara biologis serta psikologis.

Saran tersebut ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah mempunyai kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Butuh kedewasaan berpikir serta bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, permasalahan internal ataupun eksternal.

Karakteristik anak muda pada usia ini merupakan sudah bisa membina hubungan yang normal dengan lawan jenis, bisa menyeimbangkan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain, serta mulai jelas identitas sosialnya. (Suwarno, 2011).

Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Dalam hal ini sosialisasi program Kampung KB tidak berjalan sesuai dengan aturan dikarenakan kurang koordinasinya antara dinas terbaik PPKB dan pihak-pihak penyuluh Kampung KB, sehingga program-program yang seharusnya berjalan jadi terhambat. Adapun penyuluh Kampung KB mengatakan pada kelurahan Pontap masih banyak anak-anak yang tidak ataupun putus sekolah dikarenakan persoalan ekonomi.

Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dari dinas terkait untuk memberikan solusi pada anak-anak apakah dengan mengikutkan paket C atau dengan bantuan lainnya. Daerah Pontap dikatakan daerah pesisir karena letaknya yang sangat

berdekatan dengan laut dan hampir semua masyarakat yang tinggal pada kawasan ini salah satu mata pencaharian terbesarnya sebagai Nelayan/Pelaut. Dengan demikian tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pesisir rata-rata berpenghasilan rendah. Hal ini berbanding terbalik, yang sebagaimana mestinya jika dikaitkan dengan regulasi.

## **B.2. Pemahaman Warga Terhadap Program**

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk model miniature pelaksanaan total program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah.

Arti kesehatan merupakan sebuah kondisi yang stabil atau umum dalam sistem koordinasi badan dan jiwa raga manusia atau makhluk hidup lainnya pada rata-rata normal. Berkaitan dengan badan kesehatan tersebut sering dijuluki sebagai kesehatan jasmani yaitu jika koordinasi organ-organ tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya dalam keadaan yang stabil atau normal. Kurangnya pemahaman warga mengenai kesehatan menjadi hasil wawancara ini;

“kesehatannya itu, sanitasi le, itu yang utama karna masalah air bersih sudahmi. Terus masalah banyaknya pi ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya dengan asi. Kurangnya pemahaman ibu tentang asi eksklusif le. Ada tong disini banyak yang tidak dan putus sekolah, karna ketidakmampuan walaupun sudah dibilang gratis to tapi dari segi biaya-biayanya kasian, transportnya, karna rata-rata sekolah disini jauh-jauh to, seandainya ada sekolah dekat-dekat pasti mi, nah itu anak-anak kalau mau ii jalan kaki nanti

masuk semuanya orang baru sampai, itumi alasan ekonomi juga” (Penyuluh KB, 13 September 2019).

Dari hasil wawancara dengan penyuluh KB diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman warga tentang kesehatan pada kelurahan Pontap masih kurang. Hal ini ditandai dengan warga masih kurang paham mengenai pembudayaan hidup bersih (sanitasi), selain itu pada kelurahan Pontap masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak sekolah karna letak sekolah dari tempat tinggal warga yang cukup jauh. Pada kelurahan Pontap masih banyaknya ibu yang tidak menyusui anaknya dengan ASI. Dalam hal ini pengaturan mengenai pemberian Air Susu Ibu ("ASI") eksklusif diatur dalam Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi:

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Selain dari masalah kesehatan, masalah lingkungan hidup menjadi salah satu pertanyaan peneliti kepada Narasumber;

“ya disini kan masih banyak sampah, nanti setelah ada Kampung KB agak mendingan mi to, kalau dulu ededeeeee” (Ibu Anita, 13 September 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemahaman warga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih perlu ditingkatkan pada kelurahan Pontap.

Adapun manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan



Sumber: Dokumentasi Posyandu Kesehatan Kelurahan Kampung KB  
(13 September 2019)

Terkait dengan pemahaman warga, kerap diberikan sosialisasi di Posyandu. Posyandu ialah salah satu wujud upaya kesehatan bersumberdaya warga yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama warga, guna memberdayakan warga serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Peran kader dalam penyelenggaraan posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu dan melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Kampung KB Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

Manfaat PHBS di masyarakat merupakan masyarakat mampu menghasilkan lingkungan yang sehat, menghindari penyebaran penyakit, masyarakat menggunakan pelayanan sarana kesehatan serta mampu meningkatkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat.

Salah satu tatanan PHBS yang utama merupakan PHBS rumah tangga yang bertujuan memberdayakan anggota suatu rumah tangga untuk tahu, mau dan sanggup menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat serta mempunyai peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Tujuan utama dari tatanan PHBS di tingkat rumah tangga merupakan tercapainya rumah tangga yang sehat.

Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang bisa dijadikan acuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dari praktek perilaku hidup bersih serta sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga:

1. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan baik itu dokter, bidan maupun paramedis mempunyai standar dalam pemakaian peralatan yang bersih, steril dan juga aman. Langkah tersebut bisa menghindari peradangan serta bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu serta bayi yang dilahirkan.

2. Pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga.
3. Menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di Posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk.
4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman.
5. Menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat.
6. Menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan.
7. Memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit.

8. Konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat.
9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga.
10. Tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan.

Dapat ditarik kesimpulan pada rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pelaksanaan program pada Kampung KB kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yang terbagi menjadi 2 indikator, yaitu sosialisasi dan pemahaman warga tentang program. Pada indikator pertama sosialisasi program masih perlu ditingkatkan, selain itu sosialisasi kelompok kerja (pokja) dilaksanakan setiap sebulan sekali, pertemuan loka karya mini dilakukan setiap 2 bulan sekali, dan musyawarah kelurahan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Selanjutnya pada indikator kedua dapat disimpulkan bahwa pemahaman warga terhadap pentingnya sanitasi, PHBS dan pemberian ASI eksklusif pada bayi balita perlu ditingkatkan, dalam hal ini pengaturan mengenai pemberian Air Susu Ibu ("ASI") eksklusif diatur dalam Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan").

### **C. Solusi Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur**

Tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung. Secara umum Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung atau yang setara melalui program kependudukan dan pembangunan keluarga (KKBPK), serta pembangunan di berbagai sector dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB bukan hanya melibatkan Dinas KB saja, namun juga melibatkan seluruh Dinas instansi terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran, perbatasan, terpencil dan wilayah nelayan khususnya Masyarakat pesisir Kelurahan Pontap.

Adapun dari penjelasan diatas dapat diukur dalam 3 indikator;

#### **C.1. Intensivitas Sosialisasi Program**

Cara agar masyarakat kelurahan Pontap bisa menerima dengan baik adanya program Kampung KB ini adalah dengan melakukan intensivitas sosialisasi. Dimana dalam melaksanakan hal tersebut dibagi menjadi 3 jenis pembinaan yaitu, Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL). Adapun tanggapan masyarakat kelurahan Pontap terkait intensivitas sosialisasi program

“tidak bisa berjalan kalau tidak ada lintas sector didalamnya. KB itu hanya menyediakan wadah kemudian lintas sektor yang bekerja sebagaimana ku sampaikan tadi. Diliat di wilayah Kampung KB itu jalanannya tidak bagus, masa KB yang mau perbaiki, tentu PU yang

perbaiki. Kemudian pendidikannya, masa KB yang mau perbaiki pendidikannya banyak anak putus sekolah, tentu Dinas Pendidikan. Kemudian kesehatannya masa KB yang mau layani orang demam, pasti kesehatan, salah satunya dengan adanya posyandunya, pendidikan adanya PAUD nya, KB adanya semua Poktan didalamnya, ini menyatu bekerja sesuai dengan proporsinya” (Bapak Baharuddin, 13 September 2019)

Pada hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam program Kampung KB semua punya lintas sector, KB hanya sebagai wadah dan yang bekerja didalam lintas sector terkait. Regulasi yang mengatur tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan pengaturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan: mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

## C.2. Pembinaan

BKKBN tekankan pentingnya Kampung KB, sebagai tindak lanjut dari program Kampung KB maka hal terpenting adalah dengan membina keluarga. BKKBN sebagai Instansi yang mengawal berjalannya program-program Keluarga Berencana sangat mengharapkan sosialisasi Kampung KB ini dapat memberikan pengetahuan dan paradigma baru bagi keluarga agar terencana masa depannya. Keluarga yang terencana yaitu keluarga dapat mengimplementasikan 8 fungsi keluarga secara optimal. Keluarga yang bahagia sejahtera wajib mengimplementasikan 8 fungsi keluarga, tujuannya yaitu:

1. Agama, Keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki keyakinan akan keagamaan yang kuat.
2. Sosial, Keluarga adalah lingkup sosial terkecil dalam masyarakat. Sehingga manusia-manusia cerdas dan sehat akan tercipta dari lingkungan sosial keluarga yang baik pula.
3. Cinta kasih, keluarga merupakan sarana dan prasana bagi individu untuk menyalurkan cinta kasih satu sama lain.
4. Perlindungan, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling melindungi satu sama lainnya.
5. Ekonomi, di dalam keluarga setiap individu dituntut untuk memiliki soft skills dan keterampilan untuk membangun ketahanan perekonomian keluarga.

6. Pendidikan, pendidikan yang baik adalah bermula pada saat dirumah dan anak-anak harus dekat dengan ibunya karena ibu adalah pendidik utama anak.
7. Pelestarian lingkungan, lingkungan adalah suatu tempat yang terdiri dari masyarakat dan satuan terkecilnya yaitu keluarga apabila suatu lingkungan masyarakat sehat maka keluarga yang didalamnya dapat menjadi sehat, bahagia, dan sejahtera.
8. Reproduksi, dalam meneruskan dan melanjutkan keturunan maka sebuah keluarga harus merencanakan masa depan termasuk berencana dalam berkeluarga. Menggunakan alat kontrasepsi dan pil KB merupakan upaya yang dilakukan agar keluarga bahagia sejahtera.

Selain pembinaan keluarga, dalam Kampung KB juga dilakukan pembinaan kelompok Tribina (BKL, BKB, BKR dan UPPKS). Adapun tujuan dari masing-masing, yakni:

Bina Keluarga Balita (BKB), bertujuan untuk pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader, BKB ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecederaan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Bina Keluarga Lansia (BKL), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia agar lansia itu sendiri lebih produktif. Bina Keluarga Remaja (BKR), bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada keluarga tentang pola asuh anak remaja agar terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari narkoba, terhindar dari menikah di usia muda agar remaja punya masa depan yang lebih baik dan nikah di usia yang tepat. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), bertujuan untuk memberikan wadah pembelajaran untuk mengenal usaha skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, khusus KPS dan KS 1. Artinya, UPPKS berusaha mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Sasaran UPPKS adalah peserta KB, pasangan usia subur, khususnya Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS 1).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi pelaksanaan program Kampung KB selain melakukan intensivitas sosialisai, perlu juga dilakukan pembinaan, pada indikator ini membina keluarga adalah hal terpenting yang telah ditekankan oleh BKKBN. Sebagai instansi yang mengawal program-program Kampung KB, BKKBN sangat mengharapkan pembinaan di Kampung KB ini dapat memberikan pengetahuan bagi keluarga agar terencana masa depannya. Dalam Kampung KB selain melakukan pembinaan keluarga, terdapat pula pembinaan kelompok Tribina (BKL, BKB, BKR, dan UPPKS)

### **C.3. Pengembangan**

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagi indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi

keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Pengembangan sosialisasi program pada kelurahan Pontap sedikit mengalami hambatan, hal tersebut disampaikan oleh Narasumber;

“pengembangannya sedikit terhambat, karna dana Kampung KB yang seharusnya dipakai untuk mengembangkan program dikendalikan oleh dinas terkait, jadi solusinya perlu adanya keterbukaan informasi dana, ada permasalahan disitu sehingga menghambat sosialisasi kegiatan” (Pak Baharuddin, 13 September 2019)

Kegiatan tentu membutuhkan dana, namun demi kelancaran dan kepercayaan publik seharusnya setiap pelayanan publik perlu memberikan keterbukaan informasi terkait dengan dana sehingga pengembangan program dapat berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu, berikut beberapa pengembangan program untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan di Kampung KB kelurahan Pontap, yakni:

- Dinas Pendidikan, pengembangannya berupa pembangunan sekolah PAUD, mendata masyarakat yang putus sekolah.
- Dinas kesehatan, pengembangannya berupa pembangunan posyandu untuk pelayanan masyarakat.
- Dinas kebersihan dan lingkungan hidup, pengembangannya berupa pembuatan bak sampah sementara (TPS), penghijauan lokasi Kampung KB.
- Dinas Pertanian, pengembangannya berupa pemberian bibit untuk pemanfaatan pekarangan

- Kemenag, pengembangannya berupa memberikan penyuluhan untuk menjadi keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Dinas Perindustrian, pengembangannya berupa memberikan bantuan POKTAN kepada UPPKS.
- Dinas Perdagangan UKM, pengembangannya berupa pemberian modal, usaha kecil menengah.
- Dinas Tarkim, pengembangannya berupa bedah rumah bagi keluarga yang kurang mampu
- Dinas PUPR, pengembangannya berupa pembenahan jalan dan jembatan, saluran air.

Pada rumusan masalah kedua mengenai bagaimana solusi pelaksanaan program Kampung KB pada Kelurahan Pontap yang terbagi menjadi tiga indikator intensivitas sosialisasi program, pembinaan, dan pengembangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam program Kampung KB terdapat poktan dan pokja yang mana masing-masing memiliki tugas, pada indikator pembinaan pertemuan pembinaan kelompok Tribina (BKL, BKR, BKB, dan UPPKS) dilaksanakan dalam 2 bulan sekali yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anggota kelompok kegiatan Kampung KB dan pada indikator terakhir disimpulkan yakni pengembangan program untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral seperti Dinas Pendidikan pengembangannya berupa pembangunan sekolah PAUD dan pendataan warga putus sekolah, dinas kesehatan pengembangannya pengembangannya berupa pembangunan posyandu untuk pelayanan masyarakat, dll.

Karena dengan adanya program Kampung KB memberikan manfaat bagi masyarakat hingga program dan solusi tersebut haruslah tercapai, adapun manfaat program Kampung KB pada masyarakat;

#### 1. Mengetaskan kemiskinan lewat program Kampung KB

Sejak tahun 2016, Pemkab Palopo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Palopo kini telah mencanangkan dan menetapkan sejumlah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang tersebar di 23 kecamatan. Penetapan Kampung KB itu bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan bagi desa tertinggal, desa jauh, desa di perbatasan dan desa wilayah kawasan pesisir, dengan maksud agar pengentasan kemiskinan masyarakatnya mampu dipercepat.

Rapat koordinasi yang digelar di Gedung PKK Kota Palopo ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Palopo, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas DP2KBP3A, Tim Pokja Kampung KB tingkat Kota Palopo dan tingkat Kelurahan, Koordinator penyuluh PLKB, Pos KB.

Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, program ini perlu mendapat perhatian yang sama dan terintegrasi dari berbagai pihak. Sehingga program Kampung KB tidak dipandang sebagai Kampung BKKBN. Namun, Kampung KB sebagai lokus program yang terintegrasi dari berbagai sektor bisa menjadi solusi dalam menyukseskan program.

”Kampung KB ini bisa menjadi solusi mengurai permasalahan dari bawah, maka perlu adanya koordinasi dan kerja sama dengan seluruh sektor untuk melahirkan program yang pro rakyat,” kata Kepala Perwakilan BKKBN.

Kampung KB adalah kampung keluarga berkualitas yang merupakan pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga seluruh aspek khususnya tim pokja Kampung KB, para PLKB, Pos KB Desa di Kota Palopo

”selain itu, Kampung KB juga bisa bersinergi dalam pelaksanaan program kegiatan terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan desa tertinggal yang jumlahnya sebanyak 201 dan pelayanan lainnya. Sehingga capaian target kinerja program KB mencapai sasaran yang diharapkan,” ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, ada tiga unsur yang berperan optimal dalam melaksanakan yaitu pemkab, pihak swasta dan masyarakat. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tetapi juga memberdayakan potensi warga agar berperan nyata dalam pembangunan.

“Saya yakin jika tiga unsur ini bekerja sama dengan baik dan berperan serta bertanggung jawab sesuai tupoksinya, maka program Kampung KB ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan,” ucapnya.

Penetapan Kampung KB berdasarkan dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ/2016 tentang Instruksi Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB.

## 2. Program Kampung KB solusi bagi masalah Kependudukan

Kepala Dinas PPKB mengakui, penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terintegrasi dengan baik adalah jawaban untuk sejumlah persoalan kependudukan saat ini.

Selain itu, Program KKBPK juga bermanfaat menurunkan angka kematian ibu serta mendorong keluarga agar lebih sejahtera. Apalagi program ini juga dapat mempengaruhi program-program lainnya.

Suriani A. Kaso mengatakan, untuk mewujudkan visi serta misi Kota Palopo, aspek pengendalian penduduk menjadi salah satu bagian berarti di dalamnya. Oleh karena itu, langkah untuk mewujudkan visi Pemerintah sejalan dengan BKKBN, ialah mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang guna terciptanya keluarga berkualitas.

“Kita harus meyakinkan warga, bahwa program KKBPK tidak bertujuan menghalangi kelahiran, tetapi mengatur serta merancang kelahiran secara bijaksana, sehingga lahir anak-anak yang sehat serta pintar. Untuk itu saya berharap SKPK bisa menunjang program KKBPK,” ucap Suriani A. Kaso

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN kota Palopo berkata, Rakorda Program KKBPK dalam rangka pertemuan integrasi Kampung Keluarga Berencana bersama mitra kerja, mengangkat tema pentingnya “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang serta Keluarga Berkualitas”.

Kepala Perwakilan BKKBN kota Palopo, mendukung penuh program KKBPK terlaksana dengan baik di daerah masing-masing. Serta terintegrasi dengan program pembangunan lintas zona yang lain di Kampung KB. Lanjutnya, BKKBN memiliki program 1000 Hari awal Kehidupan, sejak janin dalam kandungan, usia balita/anak, usia remaja, dewasa, berkeluarga, sampai Lansia, BKKBN mempunyai program aksi disetiap tahapan kehidupan tersebut serta dilayani melalui aktifitas kelompok kegiatan.

“Untuk itu saya ingin pemerintah daerah, OPD KB, dan mitra kerja, bersama BKKBN mensukseskan Program KKBPK yang kita mulai dari keluarga. Keluarga berkualitas serta sejahtera akan mewujudkan Pontap Hebat dan begitu juga dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas,” tutur Kepala Perwakilan BKKBN kota Palopo

Kelompok kegiatan yang dimaksud melalui pembentukan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), Rumah Data Kependudukan, Pojok Kependudukan, dan delapan Fungsi Keluarga. Diharapkan dapat pdilaksanakan di Kampung KB yang telah dicanangkan di Kota Palopo.

UNIVERSITAS

BOSOWA



## BAB. V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur

Sosialisasi dan pemahaman warga tentang program menjadi indikator pada hal ini. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program masih perlu ditingkatkan, selain itu sosialisasi kelompok kerja (pokja) dilaksanakan setiap sebulan sekali, yang bertujuan untuk membahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan pengembangan dan pembangunan di Kampung KB. Pertemuan lokakarya mini dilakukan setiap 2 bulan sekali bertujuan untuk membangun sinergitas dan kerjasama dalam mempromosikan program Kampung KB, dan musyawarah kelurahan dilakukan setiap 2 bulan sekali yang bertujuan untuk rembulan sekaligus menampung aspirasi masyarakat Kampung KB dalam pelaksanaan program Kampung KB agar menjadi lebih bermanfaat atau berdampak pada masyarakat Kampung KB. Selanjutnya pada indikator kedua dapat disimpulkan bahwa pemahaman warga terhadap pentingnya sanitasi, PHBS dan pemberian ASI eksklusif pada bayi balita perlu ditingkatkan, dalam hal ini pengaturan mengenai pemberian Air Susu Ibu ("ASI") eksklusif diatur dalam Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan").

## **2. Solusi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo**

Intensivitas sosialisasi program, pembinaan, dan pengembangan menjadi indikator pada hal ini. Pada indikator intensivitas sosialisasi program hasil dari wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam program Kampung KB semua punya lintas sektor, KB hanya sebagai wadah yang bekerja dalam lintas sektor terkait. Pada indikator pembinaan, selain dilakukannya pembinaan keluarga, adapun pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dilaksanakan dalam 2 bulan sekali yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anggota kelompok kegiatan Kampung KB dan pada indikator terakhir disimpulkan yakni pengembangan program untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral seperti Dinas Pendidikan pengembangannya berupa pembangunan sekolah PAUD dan pendataan warga putus sekolah, dinas kesehatan pengembangannya berupa pembangunan posyandu untuk pelayanan masyarakat, dll.

### **A. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan mengenai Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (PPKB) di harapkan lebih menjalin komunikasi dengan pihak-pihak pelaksana di daerah yaitu melalui pihak sesuai dengan Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ mengenai hal Pencanaan Dan Pembentukan Kampung KB dan Keputusan Bupati Palopo Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Penetapan Wilayah Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Palopo Tahun 2016 yang salah satunya penetapannya berisi di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo merupakan wilayah penetapan pembentukan Kampung KB oleh karena itu agar mengetahui hal-hal apa saja kendala dan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh kader-kader Kampung KB agar Program Kampung KB di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo berjalan sesuai dengan yang di harapkan dan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat di daerah tersebut.
2. Intensivitas sosialisasi program dan pengembangan Kampung KB di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo di harapkan lebih membina masyarakat dan mengajak turut serta di dalam program Kampung KB dan di harapkan kader-kader Kampung KB Kelurahan Pontap tidak hanya berpangku tangan menunggu instruksi dari dinas terkait/PPKB, lakukan hal-hal yang di rasa berpotensi untuk di kembangkan melalui pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan dapat

memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, karena itu merupakan tujuan utama Kampung KB di bentuk oleh pemerintah yaitu menciptakan keluarga berencana yang sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

Agostiono 2010, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Word Press.

Ali, Mukti 1974. *Keluarga Berencana Menurut para Ahli*. Agama Keluarga Berencana dan Kependudukan. Jakarta: BKKBN, Biro Penerangan dan Motivasi

Arikunto, Suharsimi 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta

Edward III, C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Inc.

Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gava Media

Januar, Iqbal 2017. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung Skripsi*. Bandung, Universitas Komputer Indonesia

Mazmanian, Daniel A. and Paul A Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983

Pramithasari, Anindya. Wayan. 2015. *Implementasi program keluarga berencana (kb) Jurnal*. Surabaya: Fakultas imu social dan ilmu politik Universitas Negri Surabaya.

Suska. 2011. *Defiisi Kualitas Hidup Jurnal*. UIN

Prawiroharjo, Sarwono 2015. *Keluarga Berencana Menurut para Ahli*. Naskah Kongres I PKBI, BKKBN, Jakarta

2017, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB*, Buku. BKKBN

Radianto, Priyo. R. 2015. *Strategi Komunikasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Provinsi Diy Dalam Menginformasikan Program Pembentukan Kampung Kb Di Yogyakarta Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rizqy, Rahma 2018. *Indikator kesejahteraan keluarga*. Jakarta. BKKBN

Setiawati, Elsa. 2017. *Presepsi masyarakat terhadap program Kampung keluarga berencana Jurnal*. Palu: fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Tadulako Palu.

Sorre, U.B. dkk. 2017. *Pedoman Standar Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Jurnal*. Makassar: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)

Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif





# LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 1229/IP/DPMTSP/IX/2019

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : AFWAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : BTN. Merdeka Non Blok Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 4515021017

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KAWASAN PESISIR KELURAHAN PONTAP KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : KELURAHAN PONTAP KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 10 September 2019 s.d. 10 Oktober 2019

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 11 September 2019

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

f. Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP**

Pangkat : Penata

NIP : 19780805 201001 1 014

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**KECAMATAN WARU TIMUR**  
**KELURAHAN PONTAP**

*Jalan Yos Sudarso No. 47 Telp. (0471) .....Kota Palopo*

**SURAT KETERANGAN**

No : 440 / 188 / KP / IX / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Pontap menerangkan bahwa :

Nama : **AFWAH**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Bua, 29-08-1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Ketanon RT. 001 / RW. 001  
Kelurahan Diwek Kecamatan Diwek  
Kabupaten Jombang

Benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Pontap selama 1 ( Satu ) bulan. Mulai tanggal 10 September 2019 S/d 10 Oktober 2019 dengan judul Penelitian :

***"IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KAWASAN PESISIR KELURAHAN PONTAP KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO "***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Oktober 2019  
**AN. LURAH PONTAP**  
Kasi Pemb Masy & Kel  
**LALU GDE WIRHAN DWI S.S.STP**  
NIP. 19931107 201609 1 002

